

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam perkembangan pembangunan nasional serta berperan penting dalam kemajuan perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur masalah pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa Pasal 8 Ayat 3 menyatakan bahwa “ Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan perekonomian yang ada pada desa, akan tetapi agar terciptanya desa yang mandiri dan desa yang maju melalui kekayaan alam yang dimiliki oleh desa tersebut (Sopanah et al., 2023). Pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan yang signifikan, pembangunan tersebut meliputi pembangunan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan pelayanan (Purnamawati et al., 2023). Dalam upaya untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah telah mendorong

pembentukan BUM Desa sebagai instrument penting dalam meningkatkan perekonomian desa. BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang dilakukan. BUM Desa didirikan bermaksud untuk menampung segala kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk badan usaha yang dikelola secara mandiri, efektif serta efisien (Indrawan & Marvilianti Dewi, 2022).

BUM Desa merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama rakyat desa yang memiliki upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kohesi sosial masyarakat, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa itu sendiri (Sinarwati et al., 2023), yang dibentuk berdasarkan atas musyawarah bersama. Organisasi bisnis BUM Desa merupakan penggerak ekonomi dalam konteks komunitas lokal (desa) dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kurniawan.P.S et al, 2024). Oleh karena itu, dengan keberadaan BUM Desa diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. BUM Desa berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, permodalan, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa (Sujarweni, 2019). Keberadaan BUM Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan dan pembangunan BUM Desa di tingkat desa. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang didirikan untuk meningkatkan PADes. BUM

Desa juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di Desa (Sinarwati et.al, 2021).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak BUM Desa yang tersebar di setiap Kabupaten/Kotanya dengan jumlah BUM Desa sebanyak 627 unit BUM Desa dari 8 Kabupaten yang tersebar di Provinsi Bali. Perkembangan BUM Desa di Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan berdasarkan atas amanat dari Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali I Nengah Suta Maryana telah menargetkan untuk seluruh desa yang ada di Bali sudah mempunyai BUM Desa di tahun 2023, pernyataan tersebut dipublikasi dalam [www. Tribun Bali.com](http://www.TribunBali.com) yang berjudul “91 Desa di Bali Belum Punya BUMDes, Dinas PMD Target Rampung 2023” yang dipublikasi pada Rabu, 25 September 2015. Adanya amanat tersebut diharapkan agar mampu mendorong Kabupaten di Bali untuk membentuk BUM Desa serta meningkatkan perkembangan BUM Desa pada setiap Desa.

Tabel 1. 1

Data Jumlah BUM Desa di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Total Desa	Total BUM Desa
1	Jembrana	41	41
2	Tabanan	133	133
3	Badung	46	46
4	Denpasar	27	27
5	Klungkung	53	51
6	Gianyar	64	64
7	Bangli	68	68
8	Karangasem	75	74
9	Buleleng	129	123
Total		636	627

Sumber : Kemendesa PDTT, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui, bahwa jumlah BUM Desa terbanyak terletak di Kabupaten Tabanan, dengan jumlah 133 unit BUM Desa yang sebanding dengan jumlah desa di Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan BUM Desa di Bali pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa kabupaten lainnya seperti Kota Denpasar, memiliki jumlah BUM Desa yang lebih sedikit karena adanya perbedaan jumlah desa pada setiap kabupaten di Provinsi Bali. Pada umumnya jumlah BUM Desa di setiap kabupaten, berdasarkan banyaknya desa yang terdapat di dalamnya. Pada tabel juga diterangkan bahwa masih terdapat beberapa kabupaten yaitu Klungkung, Karangasem dan Buleleng yang jumlah BUM Desanya tidak sebanding dengan jumlah desa yang terdapat pada kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pengembangan dan pemanfaatan BUM Desa antar kabupaten di Provinsi Bali, seperti rendahnya kapasitas kelembagaan desa dan adanya keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur yang mendukung jalannya BUM Desa.

Tabel 1. 2

Data Jumlah BUM Desa di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa
1	Baturiti	12	12
2	Kediri	15	15
3	Marga	16	16
4	Penebel	18	18
5	Tabanan	12	12
6	Kerambitan	15	15
7	Selemadeg Timur	10	10
8	Selemadeg	10	10
9	Selemadeg Barat	11	11
10	Pupuan	14	14
Total		133	133

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1. 2 diatas, diketahui bahwa seluruh Desa di Kabupaten Tabanan telah memiliki BUM Desa, sehingga jumlah BUM Desa yang tersebar di Kabupaten Tabanan sebanyak 133 BUM Desa. Kecamatan Penebel memiliki jumlah BUM Desa terbanyak di Kabupaten Tabanan yaitu sebanyak 18 unit BUM Desa, sebaliknya Kecamatan Selemadeg Timur dan Selemadeg memiliki jumlah BUM Desa lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu sebanyak 10 unit BUM Desa.

Kabupaten Tabanan sebagai kabupaten yang memiliki jumlah BUM Desa terbanyak di Provinsi Bali, tentunya perkembangan BUM Desanya menjadi sorotan dan salah satu fokus utama dari pemerintah, dalam upaya untuk perkembangan pembangunan ekonomi desa. Perkembangan BUM Desa memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan BUM Desa. Oleh karena itu, Kabupaten Tabanan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) telah aktif untuk mendorong pembentukan BUM Desa di Tabanan agar tergeraknya perkembangan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, BUM Desa juga memberikan keuntungan bagi pemerintah yaitu dengan berkembangnya BUM Desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aktivitas pengelolaan BUM Desa terutama pada aktivitas pengelolaan keuangan, tentunya tidak terlepas dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten. Setiap BUM Desa juga diharapkan untuk mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas BUM Desa yang nantinya dapat berguna untuk pihak yang berkepentingan. Dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan BUM Desa di Kabupaten Tabanan, tentunya terdapat permasalahan yang timbul dalam kegiatan

operasionalnya. Salah satunya adalah terkait dengan kualitas pelaporan keuangan yang mencakup ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan BUM Desa.

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi maupun entitas yang harus disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang disajikan untuk menghasilkan suatu informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Pertiwi, 2021) . Pelaporan keuangan yang memadai merupakan salah satu indikator kesuksesan sebuah usaha (Herawati et al., 2020). Dengan adanya laporan keuangan, pemilik usaha akan mengetahui dengan jelas bagaimana kinerja usaha yang dijalaninya, bagaimana perkembangan modalnya dan apakah kebutuhan persediaan mencukupi atau tidak (sinarwati). Sedangkan pelaporan keuangan yang kurang memadai dapat berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada BUM Desa.

Pelaporan keuangan harus dilakukan dengan transparansi yaitu secara terbuka, jelas dan dapat diakses. Serta akuntabilitas yaitu setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan atauran yang berlaku. Dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel , pengelolaan keuangan akan lebih dipercaya dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau fraud. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tersebut pengelola BUM Desa diharapkan mampu memperkerjakan orang-orang yang jujur dan menciptakan budaya kerja yang baik (Werastuti et al., 2023), sehingga menimbulkan pelaporan keuangan yang memadai.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengambilan suatu keputusan financial serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut (Dewi & Sari, 2019). Kualitas laporan keuangan merupakan hal penting bagi suatu organisasi atau entitas untuk menunjukkan kinerjanya selama periode tertentu dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan (Adiputra, 2018). Laporan keuangan memberikan informasi bagi pengguna agar tidak terjadinya kesenjangan informasi keuangan suatu organisasi atau entitas, sehingga pelaporan keuangan harus secara rutin dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berjalan dengan maksimal atau sebaliknya.

Permasalahan yang sering terjadi pada BUM Desa di Kabupaten Tabanan pada saat ini yaitu mengenai ke terlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya. Berikut penulis uraikan data jumlah BUM Desa yang melaporkan ataupun belum melaporkan laporan keuangan berdasarkan atas data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1. 3 Data Pelaporan Laporan Keuangan BUM Desa di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan	Jumlah BUM Desa	Melaporkan Laporan Keuangan			
			2023		2024	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Baturiti	12	11	1	11	1
2	Kediri	15	13	2	15	0
3	Marga	16	13	3	16	0
4	Penebel	18	14	4	16	2
5	Tabanan	12	3	9	7	5
6	Kerambitan	15	15	0	15	0
7	Selemadeg Timur	10	9	1	10	0
8	Selemadeg	10	8	2	9	1
9	Selemadeg Barat	11	8	3	10	1
10	Pupuan	14	8	6	11	3
Total		133	103	31	120	13

Sumber : DPMD Kabupaten Tabanan, data diolah penulis 2025

Berdasarkan data dari Tabel 1.3 di atas, pada tahun 2023 sebanyak 103 unit BUM Desa yang melaporkan laporan keuangan dan 31 unit BUM Desa yang tidak melaporkan laporan keuangannya, sedangkan pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan kepatuhan pelaporan laporan keuangan yaitu sebanyak 120 unit BUM Desa telah melaporkan laporan keuangannya dan 13 unit BUM Desa yang tidak melaporkan laporan keuangan. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, Kecamatan Kerambitan menunjukkan tingkat kepatuhan yang paling tinggi dalam pelaporan laporan keuangan BUM Desa, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kecamatan dengan kinerja yang paling konsisten dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan di Kabupaten Tabanan. Sebaliknya, Kecamatan Tabanan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah dalam pelaporan laporan keuangan BUM Desa.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Tabanan adalah mengenai kualitas pelaporan keuangannya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pelaporan laporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan, dengan frekuensi penyampaian laporan keuangan yang paling minim dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu BUM Desa Kecamatan Tabanan dikatakan sebagai BUM Desa yang tidak melaporkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan aturan. Hal tersebut didukung dengan adanya publikasi yang berjudul “ 55 BUMDes Tidak Maksimal” yang dipublikasikan dalam www.nusabali.com pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan menyatakan bahwa penyebab BUM Desa di Tabanan berjalan tidak maksimal terdapat pada pelaporan laporan keuangannya.

Untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bapak Wayan Arka, yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang terjadi pada BUM Desa di Kabupaten Tabanan yaitu mengenai pelaporan laporan keuangan. Pelaporan Laporan keuangan BUM Desa dilakukan setiap akhir bulan, tetapi berdasarkan data yang ada masih banyak yang tidak menyampaikan laporan keuangannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan berdasarkan atas surat edaran, sehingga laporan keuangan bulanan tidak dapat disajikan.

Berdasarkan atas informasi yang didapat pada observasi awal, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab masih adanya BUM Desa di Kecamatan Tabanan yang tidak melaporkan laporan keuangan, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada BUM Desa yaitu pengelola BUM Desa sendiri, Sistem Informasi Akuntansi dan kurangnya pengawasan dari badan pengawas dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa.

Kualitas SDM merupakan hal penting dalam suatu organisasi, dengan adanya kualitas SDM yang baik tentunya akan memberikan keuntungan yang besar dan kegiatan operasional suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan harapan. Sebaliknya, apabila kualitas SDM suatu organisasi yang rendah tentunya akan menimbulkan masalah sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku pada BUM Desa, kegiatan operasional BUM Desa terutama pada aktivitas pengelolaan keuangan, tentunya tidak terlepas dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten (Atmadja et al., 2024). Masih kurangnya

pengetahuan dan pemahaman pada bidang akuntansi yang dimiliki oleh pengelola BUM Desa dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas dari pelaporan laporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan menjadi rendah. Pengelola BUM Desa di Kecamatan Tabanan masih kurang memahami akuntansi berdasarkan dengan aturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pelatihan akuntansi yang dikhususkan untuk setiap pengelola BUM Desa, sehingga para pengelola BUM Desa hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri tanpa adanya pelatihan khusus untuk menyelaraskan isi dari laporan keuangan pada setiap BUM Desa yang ada di Kecamatan Tabanan.

Selain kualitas SDM, kualitas Sistem Informasi Akuntansi di BUM Desa juga dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan pada BUM Desa. Sistem Informasi Akuntansi yang memadai akan membantu para pengelola BUM Desa di Kecamatan Tabanan. Kurangnya kualitas dari sistem informasi akuntansi karena adanya update dari aplikasi sistem informasi akuntansi yang dapat memperlambat proses pelaporan keuangan, sehingga pemanfaatan sistem informasi akuntansi belum diterapkan secara optimal, serta kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi pada pengelola keuangan BUM Desa. Pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan juga belum menggunakan Aplikasi Akuntansi yang memadai dan hanya berfokus pada BUM Desa, pada beberapa BUM Desa yang telah penulis datangi hanya menggunakan Microsoft Excel dalam pencatatan akuntansinya. Oleh karena itu, kualitas sistem informasi akuntansi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengelola BUM Desa, sehingga dapat memudahkan dalam pencatatan akuntansi BUM Desa yang dapat memperlancar proses

penyusunan laporan keuangan agar nantinya dapat disampaikan dengan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang ada.

Kurang adanya pengawasan dan motivasi dari atasan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan juga menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepengurusan yang berganti – ganti pada BUM Desa yang dapat menyebabkan kurang adanya pemahaman terhadap pengelolaan BUM Desa, yang berdampak pada minimnya pengawasan kegiatan operasional BUM Desa. Pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan terdapat beberapa pengelola yang bertugas untuk mengatur kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah Badan Pengawas. Rendahnya tingkat pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BUM Desa dapat mempengaruhi kurangnya motivasi dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, badan pengawas BUM Desa harus melakukan pengawasan secara rutin sehingga pelaporan keuangan BUM Desa dapat disampaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan karena wilayah ini memiliki jumlah BUM Desa yang relatif banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali. Akan tetapi, berdasarkan atas publikasi yang berjudul “ 55 BUMDes Tidak Maksimal” yang dipublikasikan dalam www.nusabali.com pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan menyatakan bahwa penyebab BUM Desa di Tabanan berjalan tidak maksimal terdapat pada pelaporan laporan keuangannya, sehingga menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek pengelolaan keuangan pada BUM Desa di Kabupaten Tabanan. Kemudian, berdasarkan atas observasi awal dan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan yang

menyatakan bahwa Kecamatan Tabanan menjadi Kecamatan di Kabupaten Tabanan yang sebagian besar BUM Desanya tidak melaporkan laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya permasalahan internal dalam BUM Desa. Sehingga, penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Tabanan sebagai lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada BUM Desa yaitu Pemahaman Akuntansi yang ditandai dengan adanya kurang pemahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan BUM Desa, sehingga adanya keterlambatan dalam proses pelaporan laporan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi pada BUM Desa yang ditandai dengan adanya proses pelaporan keuangan yang lambat akibat dari adanya update aplikasi sistem informasi akuntansi serta kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi sehingga tidak bisa dijalankan dengan optimal. Kemudian faktor yang terakhir yaitu berkaitan dengan fungsi Badan Pengawas yang ditandai dengan kurang adanya pengawasan dari badan pengawas BUM Desa terkait dengan kegiatan operasionalnya.

Pemahaman akuntansi merupakan modal utama seorang pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan (Dwiyanti & Werastuti, 2024). Pada BUM Desa akuntansi juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan. Bendahara BUM Desa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi tentunya akan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

(Riyanto, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah, et al., (2023), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2023), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman et al. (2021), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati et al. (2021), menyatakan bahwa tingkat pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Andari et al, (2022), menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan et al, (2022), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri (2024), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lobiari (2024), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih et al. (2024) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah et al. (2025), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang

dilakukan oleh Pratiwi et.al (2021) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh negative terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang berperan untuk mengumpulkan, mengolah, mencadangkan, serta menyebarluaskan informasi yang digunakan pada pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Lestari & Dewi, 2020). Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang juga berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan agar nantinya mampu menaikkan kualitas pelaporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien (Taufiqurrohman et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama & Andayani W.R.D (2022), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Andari et al.(2022), menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan et al, (2022), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama et al. (2022), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman et al. (2021), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lobiari (2024), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah et al. (2025), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah (2024), menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan.

Badan Pengawas merupakan suatu kelompok yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional suatu organisasi atau entitas. Badan pengawas berfungsi untuk memastikan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tujuan dan prinsip. Pada BUM Desa badan pengawas merupakan unsur penting dalam struktur organisasi BUM Desa yang mengawasi jalannya kegiatan operasional dan keuangan BUM Desa agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan desa dan kepentingan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pebriantari et al. (2021), menyatakan bahwa badan pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Miliani et al. (2022), menyatakan bahwa badan pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hermayani et al. (2023), menyatakan bahwa badan pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih et al. (2024), menyatakan bahwa fungsi badan pengawas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati & Novariani (2021), menyatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang

dilakukan oleh Mawuntu et al. (2020), menyatakan bahwa badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Andari et al. 2022), menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2021) menyatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh negative terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri et.al (2024), menyatakan bahwa fungsi dewan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada Penelitian ini menggunakan Grand Theory (Teori Utama) kombinasi, untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Grand Theory kombinasi dalam penelitian mengacu pada penggunaan lebih dari satu teori utama, untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang kompleks. Grand Theory (Teori Utama) yang mendasari penelitian yang dilakukan pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan adalah Human Capital Theory serta Agency Theory atau Teori Keagenan dan DeLone & McLean IS Succes Model sebagai teori pendukung.

Human Capital Theory merupakan teori yang menekankan bahwa individu adalah aset atau sumber daya penting bagi suatu organisasi atau lembaga, karena mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan pengalaman yang dapat meningkatkan produktivitas serta kinerja suatu organisasi. Dalam pengelolaan keuangan BUM Desa, kualitas sumber daya manusia memainkan peran penting terutama pada aspek pelaporan keuangan. Berdasarkan Human Capital Theory, individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menghasilkan output kerja yang berkualitas.

Oleh karena itu, pemahaman akuntansi yang baik sebagai bagian dari modal manusia untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di BUM Desa.

Agency Theory adalah teori yang menyatakan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agen. Menurut Jansen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa konsep teori ini adalah sebuah perjanjian antara pemilik dan agen, dimana agen diminta untuk melakukan beberapa jasa bagi kepentingan mereka melalui pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan pada agen. Agency Theory ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan BUM Desa. Agency Theory ini relevan dalam konteks BUM Desa karena BUM Desa melibatkan hubungan antara principal yaitu pemerintah desa sebagai perwakilan masyarakat dan a gen yaitu pengelola BUM Desa. Dengan adanya teori ini mampu mendorong BUM Desa untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan antara keduanya. Agency Theory ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen (Ayem & Ramadhan, 2024). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas yang baik mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUM Desa.

DeLone & McLean IS Succes Model merupakan model evaluasi kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean pada tahun 1992. Model ini digunakan untuk mengukur seberapa sukses sistem informasi digunakan dalam suatu organisasi, melaui hubungan antar dimensi kualitas sistem, penggunaan, kepuasan dan dampak akhir. Dalam konteks BUM Desa sistem informasi akuntansi yang memiliki kualitas tinggi akan mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan relevan. Oleh karena

itu kualitas SIA memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUM Desa, sehingga DeLone & McLean IS Succes Model digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman et al.(2021). Pada Penelitian ini melakukan pengembangan variabel dependen menjadi Kualitas Pelaporan Keuangan yang sebelumnya pernah diteliti oleh Bhegawati et al. (2021), Riyanto (2023) dan Setianingsih et al. (2024). Pengembangan variabel dikarenakan memiliki jangkauan yang lebih kompleks yaitu mencakup permasalahan mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan dan kualitas laporan keuangan. Pengembangan ini didasari oleh permasalahan nyata yang terjadi di lapangan, khususnya pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan yaitu adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan serta rendahnya kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pengelola BUM Desa. Dengan memilih kualitas pelaporan keuangan sebagai fokus utama, penelitian ini tidak hanya menilai dari aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga mencakup dimensi penting lainnya seperti ketepatan waktu, keandalan, kelengkapan dan relevansi informasi dalam laporan.

Penelitian ini juga melakukan penambahan variabel Independen yaitu Fungsi Badan Pengawas, sehingga variabel independennya menjadi Pemahaman Akuntansi (X_1) yang sebelumnya pernah diteliti oleh Wiratama et al. (2022), Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (X_2) yang sebelumnya pernah diteliti oleh Andari et al. (2022) dan Fungsi Badan Pengawas (X_3) yang sebelumnya pernah diteliti oleh Dwiyanti et al. (2024). Beberapa variabel tersebut dipilih karena berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada BUM Desa di Kecamatan

Tabanan. Pada penelitian ini juga berfokus pada BUM Desa yang merupakan entitas penggerak ekonomi desa yang masih kurang mendapat perhatian.

Penelitian ini penting dilakukan karena BUM Desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan mengelola dana publik yang signifikan. Kualitas pelaporan keuangan menjadi kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUM Desa. Dengan meneliti Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Fungsi Badan Pengawas, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keandalan laporan keuangan. Dimana, laporan keuangan yang andal dihasilkan oleh adanya Sumber Daya Manusia yaitu pengelola BUM Desa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi, mampu memanfaatkan sistem informasi akuntansi dan menjaga kualitas sistem informasi akuntansi yang terdapat pada BUM Desa serta badan pengawas BUM Desa yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan kewajibannya.

Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dan perumusan kebijakan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan efisien, untuk kemajuan pengelolaan usaha pada BUM Desa. Sebaliknya, apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pengelolaan keuangan BUM Desa berisiko tidak transparan dan akuntabel. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat, lemahnya pengawasan internal dan terhambatnya perkembangan usaha BUM Desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan sistem pengawasan BUM Desa.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemahaman Akuntansi, **Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa (Studi Pada BUM Desa di Kecamatan Tabanan)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pelaporan laporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan, dengan frekuensi penyampaian laporan keuangan yang paling minim dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tabanan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pengelola BUM Desa yang kurang memiliki pengetahuan dan memahami bidang akuntansi, Pengawas BUM Desa yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUM Desa sehingga mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan.
3. Rendahnya kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada BUM Desa yang seharusnya dapat membantu pengelola BUM Desa untuk melakukan pencatatan keuangan dengan lebih cepat. Sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang relevan dalam penyampaian laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu untuk dibatasi. Maka dari itu, peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya berfokus dan berkaitan dengan permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan BUM Desa yaitu Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas batasan masalah yang telah peneliti pilih maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan?
2. Apakah Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan ?
3. Apakah Fungsi Badan Pengawas berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai, diantaranya adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa
2. Untuk menguji pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa

3. Untuk menguji pengaruh Fungsi Badan Pengawas terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan BUM Desa

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan perluasan wawasan dan pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya dan digunakan sebagai bahan sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas terhadap Pelaporan Keuangan BUM Desa di Kecamatan Tabanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi bahan implementasi atas ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama jenjang perkuliahan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan penulis tentang kinerja keuangan pada BUM Desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, hasil dari penelitian dapat

dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya serta diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaga tentang kinerja keuangan BUM Desa.

c. Bagi BUM Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat desa, yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan atau petunjuk untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada BUM Desa.

